

PEMKOT-BPD DIY BERSINERGI MUDAHKAN WAJIB PAJAK

## Pembayaran PBB Tak Perlu Tunggu Jatuh Tempo

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya dan BPD DIY bersinergi memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Melalui pekan panutan pembayaran PBB, wajib pajak diingatkan agar tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk menunaikan kewajibannya.



KR-Ardhi Wahdan

**Pj Walikota Yogya didampingi Pemimpin BPD DIY Cabang Senopati, Ketua DPRD Kota Yogya dan Kepala BPKAD Kota Yogya menunjukkan pembayaran PBB menggunakan aplikasi Bank BPD DIY Mobile.**

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menilai dengan membayarkan PBB lebih awal justru akan meringankan beban wajib pajak. "Membayar pajak lebih awal akan lebih baik. Tidak merasa dikejar-kejar, tidurnya bisa lebih nyenyak," tandasnya di sela Pekan Panutan Pembayaran PBB di Grha Pandawa Balaikota, Kamis (25/5).

Pada kesempatan itu terdapat 900 wajib pajak yang diundang dengan total ketetapan pajak Rp 26,9 miliar. Mereka adalah wajib pajak potensial dengan nilai ketetapan yang tergolong besar. Hal itu diharapkan mampu mendorong kesadaran wajib pajak lainnya agar segera membayarkan kewajibannya. Apalagi teknis pembayaran PBB kini semakin mudah dengan menggunakan aplikasi

Mobile Banking BPD DIY. Pj Walikota, Pemimpin BPD DIY Cabang Senopati, Ketua DPRD Kota Yogya dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya bahkan mencontohkan pembayaran PBB melalui aplikasi Bank BPD DIY Mobile.

"PBB merupakan bukti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di wilayah. Mengingat pentingnya pajak, maka mendorong kami di Pemkot untuk memfasilitasi agar taat membayarkan pajak. Kami apresiasi wajib pajak yang antusias hadir pada kesempatan ini," urai Singgih.

Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuridijaya MM juga turut hadir memberikan panutan. Dirinya membayar PBB secara tunai melalui loket yang sudah disiapkan dalam pro-

gram tersebut.

"Saya di sini sebagai warga masyarakat yang tinggal di Warungboto. Membayar hari ini ternyata ada dua keuntungan. Pertama mendapatkan potongan lima persen dan berkesempatan juga mendapatkan doorprize. Saya mengapresiasi dengan pekan pembayaran PBB bagi warga Kota Yogya," tandasnya.

Sementara Kepala BPKAD Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan total target PBB pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 104 miliar. Hingga saat ini capaiannya baru sekitar Rp 19,2 miliar. Kecenderungan masyarakat selama ini memang banyak yang baru membayarkan saat mendekati jatuh tempo pada 30 September. Sehingga capaian target akan melonjak saat jelang jatuh tempo.

"Pajak ini kan digunakan untuk pembangunan Kota Yogya. Pembangunan tidak dilakukan di akhir tahun melainkan sejak awal tahun sudah dimulai. Harapan kami jangan menunggu jatuh tempo untuk membayarkan pajak," harapnya.

Oleh karena itu melalui pekan panutan pembayaran PBB tersebut pihaknya ingin memberikan contoh dalam hal kepatuhan membayar pajak. Selain itu pihaknya juga terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dan transparansi serta mengurangi berbagai kesalahan data wajib pajak.

Sedangkan Pemimpin BPD DIY Cabang Senopati Suroso SE MM, mendorong pembayaran PBB melalui ap-

likasi Bank BPD DIY Mobile. Terutama bagi yang memiliki nilai ketetapan pajak hingga

Rp 250 juta. Guna mendukung pekan panutan tersebut, pihaknya memberikan

cashback 50 persen dengan maksimal Rp 20.000 bagi wajib pajak yang kemarin mem-

bayar PBB menggunakan Bank BPD DIY Mobile. (Dhi)-f



TAK SEBATAS PENYEDIAAN LAHAN

## Segera Tentukan Teknologi Pengolahan Sampah

**YOGYA (KR)** - Upaya Pemkot Yogya dalam menggulirkan gerakan bebas sampah anorganik sejak awal tahun ini perlu didukung semua pihak. Akan tetapi guna proses penanganan sampah jangka panjang, maka penggunaan teknologi untuk kepentingan pengelolaan harus segera ditentukan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta GM Deddy Jati Setiawan, mengungkapkan penanganan sampah harus menjadi prioritas karena setiap hari tidak pernah berhenti diproduksi.

"Pola penanganan tentu tidak hanya sekadar ditumpuk di satu tempat tetapi harus diimbangi dengan pengolahan dengan menggunakan teknologi. Ini supaya sampah yang diproduksi bisa habis tidak tersisa," katanya.

Tanpa ada proses pengolahan, maka jika lahan yang menjadi tempat pembuangan sampah sudah penuh maka harus menyediakan lahan baru. Kondisi tersebut kerap membutuhkan tahapan yang panjang karena kerap

**GM Deddy Jati Setiawan Fraksi PDI Perjuangan**



KR-Istimewa

dihadapkan pada persoalan sosial. Lain halnya jika sejak awal sudah memanfaatkan teknologi. Setidaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat bisa langsung diolah. Jika dari hasil pengolahan masih ada sisa, maka hal tersebut merupakan residu.

Teknologi yang biasa digu-

nakan dalam pengolahan sampah, imbuh Deddy, antara lain incenerator atau pembakaran, recycling atau daur ulang, dan komposting atau pengomposan. Ketiga jenis teknologi itu seharusnya digunakan seluruhnya dengan mendasarkan pada jenis sampah tertentu. Misalnya sampah organik seluruhnya diolah melalui metode komposting, kemudian sampah anorganik melalui recycling dan sampah plastik atau yang tidak bernilai ekonomi dengan incenerator. "Ada juga teknologi modern yang bisa dipertimbangkan. Mungkin butuh biaya besar namun dampaknya juga cukup efektif untuk penanganan jangka panjang," imbuh Deddy.

Kendati demikian, Deddy juga berharap ada kesadaran dari masyarakat sebagai pihak yang memproduksi sampah. Terutama dengan meminimalisir jumlah sampah yang dibuang serta memilah sesuai jenisnya. Proses pemilahan sampah yang mampu dilakukan sejak dari hulu, akan memudahkan teknis pengolahan. (Dhi)-f

TAHUN INI ANGKAT 'HARMONY OF KOTAGEDE'

## Pawai Alegoris, Branding Yogya Selatan

**YOGYA (KR)** - Dinas Pariwisata Kota Yogya kembali menggelar event wisata bertajuk Pawai Alegoris. Ajang tersebut menjadi bagian upaya promosi sekaligus branding potensi wisata di Yogya sisi selatan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya Wahyu Hendratmoko, menjelaskan gelaran Pawai Alegoris secara substansial hampir sama dengan event Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) yang digelar setiap 7 Oktober bertepatan dengan HUT Kota Yogya. "Kalau (WJNC) itu sudah ada lebih dulu dan lebih besar serta digelar di Yogya utara. Sehingga kita coba angkat potensi Yogya selatan dengan Pawai Alegoris," tandasnya, Kamis (25/5).

Pawai Alegoris pertama kali diselenggarakan pada tahun 2021 lalu. Saat itu tema yang diangkat ialah 'heritage in harmony'. Kemudian berlanjut di tahun 2022 dengan tema 'harmony of patirtan' yang digelar di Kali Gajah Wong berupa pawai rakit. Sedangkan tahun ini mengangkat tema 'harmony of Kotagede' yang akan digelar di sepanjang Jalan Kemas hingga Jalan Mondorakan pada Sabtu (27/5) pukul 15.30-17.00 WIB.

Wahyu menambahkan, gelaran tahun ini melibatkan 12 sanggar dari berbagai wilayah di Kota Yogya. Masing-masing akan menampilkan pawai kesenian yang bisa menjadi

daya tarik wisata. "Kami gelar cukup singkat tidak sampai dua jam. Tetapi dampak dari kegiatan itu yang ingin kami capai, yakni konten untuk promosi eksistensi kegiatan yang bisa menjadi agenda wisata. Sekaligus mengenalkan Kotagede dengan beragam potensi budayanya," urainya.

Oleh karena itu diharapkan wisatawan mampu mengetahui potensi Yogya sisi selatan yang tidak kalah menarik untuk dieksplorasi. Sehingga wisatawan yang berada di Kota Yogya bisa menambah masa tinggalnya serta meningkatkan tingkat belanja. Apalagi pihaknya menargetkan masa tinggal wisatawan ialah 1,7 hari. Hingga April lalu sudah berhasil terpenuhi 1,8 hari.

Begitu pula dari tingkat belanja wisatawan yang ditarget Rp 1,2 juta per wisatawan, hingga April mampu tercapai Rp 2,1 juta per wisatawan. Tren positif capaian target tersebut diharapkan mampu dipertahankan hingga akhir tahun mendatang. Dengan begitu dampak tingkat kunjungan wisatawan mampu dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Yogya. "Tantangannya ialah bagaimana kita semua mampu menjaga eksistensi dari setiap event yang mampu memberikan daya tarik bagi wisatawan. Alhamdulillah tingkat kunjungan wisatawan di Kota Yogya masih terus tinggi," tandasnya. (Dhi)-f

RESTORASI SOSIAL BERBASIS BUDAYA

## Kembalikan Moralitas Masyarakat

**YOGYA (KR)** - Restorasi sosial berbasis budaya menjadi gerakan yang perlu dilakukan untuk mengembalikan moralitas masyarakat termasuk menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Gerakan ini wajib dilakukan bersama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Karena restorasi sosial tersebut dapat menumbuhkan dan menggerakkan budaya-budaya luhur yang telah diajarkan oleh leluhur.

"Mari kita bersama-sama dari kelompok kecil yaitu keluarga melakukan gerakan sampai ke kelompok besar. Jika kita bersama-sama dengan tujuan yang sama ini nantinya akan berakhir indah dan terciptanya harmoni kehidupan yang sejuk, bagus serta baik di masyarakat," kata

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintersih di Yogyakarta, Rabu (24/5).

Dicontohkan, untuk pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial DIY memiliki berbagai program bantuan seperti PKH. Ketika penerima PKH ini telah meningkat taraf hidupnya, namun tidak ada itikad baik untuk laporan dan menolak pemberian PKH berikutnya.

Hal ini menjadi bukti bahwa jiwa sosial telah terkikis sehingga mereka kurang berempati terhadap orang lain yang tidak menerima manfaat. Pun dengan budaya malu yang terkikis.

"Sekarang ini program-program kami identik dengan Bansos, sering ditemukan fenomena yang terjadi di Bansos, yaitu ketika orang yang teriak karena tidak terima dan protes karena belum dapat jatah. Adakah yang teriak ketika dia dapat dan dia sudah tidak layak untuk dapat? Nah, ini yang ingin kami benahi," kata Endang.

Sementara itu Budayawan DIY, Bambang Wisnu mengungkapkan, restorasi budaya penting sebagai garda terdepan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Saat ini, sedikit banyak pergeseran budaya juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan modernitas. Menurutnya, masyarakat pelaku industri yang berada di balik pertumbuhan ekonomi dan modernitas wajib mempertahankan ciri khas budaya dan tidak membiarkan modernisasi menggerus bebas. Wajib ada ciri khas sosial budaya warisan yang tetap dipertahankan sebagai identitas. (Ria)-f

MENDUKUNG TRANSFORMASI KESEHATAN

## Lulusan Polkesyo Diharapkan Atasi Kekurangan SDM Nakes

**SLEMAN (KR)** - Sebanyak 193 wisudawan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (Polkesyo) diwisuda, Kamis (25/5). Diharapkan lulusan dari Polkesyo ini dapat mengisi kekosongan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan (Nakes) di Indonesia yang saat ini baru terisi 60 persen. Sehingga nantinya para lulusan Polkesyo dapat mendukung transformasi kesehatan di Indonesia.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI drg Arianti Anaya MKM mengatakan, Polkesyo ini merupakan salah satu kampus terbaik yang dimiliki Kemenkes. Tentunya kualitas lulusan Polkesyo ini diharapkan dapat mendukung transformasi kesehatan di Indonesia.

"Kami berharap lulusan Polkesyo ini dapat tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya kualitas tenaga kesehatan yang baik, semoga nanti dapat mendukung transformasi kesehatan di Indonesia," kata Arianti dalam acara Wisuda Ahli Madya dan Sarjana Terapan Kesehatan XXXVIII, Pelantikan Profesi Tahun Akademik 2022/2023 serta Dies Natalis ke-22 Polkesyo.

Menurut Arianti, Indonesia ini masih menghadapi tiga isu besar tentang SDM kesehatan yakni kekurangan jumlah, distribusi dan kualitas. Lulusan Polkesyo ini diharapkan dapat menyelesaikan tiga masalah



KR-Saifullah Nur Ichwan

Dirjen Nakes drg Arianti Anaya MKM mengambil sumpah wisudawan sebagai tenaga kesehatan

tersebut.

"Kami berharap lulusan Polkesyo dapat mengatasi tiga masalah besar SDM kesehatan. Soalnya di luar Jawa, khususnya Indonesia timur masih kekurangan SDM tenaga kesehatan," tegasnya.

Dikatakan, dari total puskesmas di Indonesia itu baru sekitar 60 persen yang tenaga kesehatannya lengkap. Bahkan dari 10.500 puskesmas di Indonesia, masih ada sekitar 500 puskesmas yang belum ada dokternya.

"Jadi masih ada sekitar 40 persen puskesmas di Indonesia yang belum lengkap tenaga kesehatannya. Baik itu dokter, perawat, bidan dan lainnya. Sehingga kita masih banyak PR-nya," ucapnya.

Arianti kembali menekankan, bahwa tenaga kesehatan perlu terus meningkatkan kualitasnya. Mengingat persaingan di dunia kesehatan kedepan akan semakin ketat.

"Jangan sampai tenaga keahatan itu akan jadi tamu di negara sendiri. Makanya tenaga kesehatan Indonesia tidak boleh kalah dengan tenaga kesehatan asing dengan cara terus meningkatkan kualitasnya," pinta Dirjen.

Direktur Polkesyo Dr Iswanto SPd MKes mengatakan, dalam wisuda tersebut, ada 193 wisudawan yang terdiri dari Prodi Profesi Ners 50 orang, Prodi Profesi Bidan 64 orang, Prodi Profesi Dietisien 1 orang, Prodi STr TLM 45 orang, Prodi STr Kesehatan Gigi 30 orang, DIII Sanitasi 2 orang dan STKA 1 orang.

"Untuk program Sarjana Terapan dengan IPK rata-rata 3,48 dan IPK tertinggi 3,70. Sedangkan program Pendidikan Profesi dengan IPK rata-rata 3,96 dan IPK tertinggi 4,00," kata Iswanto.

Menurutnya, tahun 2023 ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menempati urutan ke-12 dari seluruh Politeknik di Indonesia versi Webometrics, yang mendasarkan penilaiannya pada visiabilitas, transparansi, dan sitasi penelitian. Dalam klasterisasi tingkat nasional yang

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saat ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berada pada urutan kedua klaster I Poltekkes Kemenkes se-Indonesia.

"Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga menempati klasifikasi satu Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Pencapaian ini tentu sangat membanggakan," ucapnya. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta saat ini memiliki 6 Jurusan dengan 17 program studi, yaitu 7 Program Diploma Tiga (Ahli Madya), 7 Program Sarjana Terapan dan 3 program Pendidikan Profesi. Dari jumlah tersebut 16 program studi telah diakreditasi oleh LAMPTKES dengan 10 Prodi mendapatkan predikat A atau unggul dan 6 Prodi mendapatkan predikat 'Baik Sekali' atau B'. Satu prodi merupakan prodi termuda, DIII RMIK mendapatkan predikat 'Baik'.

"Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga mendapatkan mandat untuk mengembangkan kelas Internasional. Kemudian mendapatkan bantuan dana dari WHO untuk pengembangan kecakupan dosen mendukung kelas internasional dan pembuatan modul pembelajaran kelas internasional tersebut khususnya pada prodi STr Keperawatan," pungkasnya. (Sni)



KR-Saifullah Nur Ichwan

Direktur Polkesyo Dr Iswanto SPd MKes saat mewisuda wisudawan.